

---

## **IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DKI JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SIMULTANEOUS EQUATION MODEL**

### ***IDENTIFICATION OF FACTORS THAT INFLUENCE POVERTY IN DKI JAKARTA USING THE SIMULTANEOUS EQUATION MODEL APPROACH***

**Yurianto**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

e-mail : yurimerdeka@gmail.com

Diterima tanggal: 14 Oktober 2019 ; diterima setelah perbaikan: 5 November 2019 ; Disetujui tanggal: 12 November 2019

### **ABSTRAK**

Kemiskinan suatu fenomena yang ada di daerah. Daerah yang tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan daerah tersebut mengalami kegagalan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan simultaneous equation model. Tujuan penelitian ini adalah: a. mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, b. menghitung proyeksi jumlah penduduk miskin pada 2020, 2021, dan 2022, dan c. menghitung proyeksi tingkat kemiskinan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan hasil yang diperoleh, faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta adalah jumlah pengangguran. Krisis ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 357,3 ribu orang, tahun 2021 sebanyak 363,6 ribu orang, dan tahun 2022 sebanyak 347,3 ribu orang. Sementara tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tahun 2020 sebesar 3,35 persen, tahun 2021 sebesar 3,28 persen, dan tahun 2022 menjadi 3,19 persen.

**Kata kunci: Jakarta, Kemiskinan, Simultaneous Equation Model.**

### ***ABSTRACT***

*Poverty is a phenomenon that exists in the area. Regions that are unable to reduce poverty levels in their area, it can be said that the development policy of the region has failed. The approach used in this study is the simultaneous equation model approach. The objectives of this study include: a. identify factors that affect poverty, b. calculating projections of the number of poor people in 2020, 2021, and 2022, and c. calculating projections of poverty levels in 2020, 2021, and 2022. Based on the result, factor significantly affecting the number of poor people in DKI Jakarta is number of unemployment. Economic crises of 1998 also affected increasing of the number of poor people in DKI Jakarta. The number of poor people is predicted 357.3 thousand people in 2020, 363.6 thousand people in 2021, and 347.3 thousand people in 2022. The poverty rate in Jakarta in 2020 will be 3.35 percent, 3.28 percent in 2021, and 3.19 percent in 2022.*

**Keywords: Jakarta, Poverty, Simultaneous Equation Model.**

## PENDAHULUAN

Kemiskinan suatu fenomena yang ada di daerah. Semakin banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan maka semakin tidak sejahteranya daerah tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa daerah yang tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemabngunan daerah tersebut mengalami kegagalan. Untuk itu pemerintahan di daerah selalu berusaha untuk menyusun kebijakan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan.

Pada era otonomi daerah, yang dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 pada 2001 pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dibanding sebelumnya. Kewenangan pemerintahan daerah termasuk dalam hal ini adalah penanggulangan kemiskinan. Ini didasarkan bahwa prinsip dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha dengan kemampuan keuangan sendiri untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Martinez-Vazquez & McNab (2001) bahwa sentralisasi fiskal di negara berkembang untuk memilih desentralisasi fiskalnya adalah: (1) dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pengeluaran pemerintah akan lebih lebih efisien, (2) dengan sentralisasi fiskal diakui telah mengalami kegagalan, dan (3) peran pemerintah daerah akan lebih besar dan pemerintah daerah tidak didikte oleh pemerintah pusat.

DKI Jakarta dalam tata pemerintahan mempunyai kekhususan. Hal ini sebagaimana diatur oleh UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini bahwa otonomi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta bukan pada Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Artinya bahwa kebijakan pemerintahan terletak pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dalam konteks kebijakan strategis termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan berada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu Jakarta mempunyai multi peran, yaitu sebagai ibukota negara, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pemerintahan, dan pusat berdomisilinya para perwakilan negara sahabat. Dengan demikian jumlah penduduknya banyak, multi suku dan multi budaya, serta permasalahannya kompleks. Tentu permasalahan kemiskinannya juga kompleks, besar,

dan menantang.

Terlepas dari itu semua, fenomena kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Artinya bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, dan kebijakan. Penyebab kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karenanya dalam mempelajari isu kemiskinan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu dan harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

Dengan mendasarkan pada kondisi di atas, maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif berkaitan dengan penyebab kemiskinan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Berkaitan dengan hal ini maka dilakukan kajian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemiskinan di DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan pendekatan model persamaan simultan (*simultaneous equation model*). Sedangkan secara rinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Menyusun proyeksi jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Menganalisis fenomena perekonomian dan kemiskinan DKI Jakarta.

Lokus dan focus kajian ini di wilayah administrasi DKI Jakarta. Oleh karena itu, maka hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

## BAHAN DAN METODE

### Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia. Model persamaan simultan (*simultaneous equation model*) akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam pengolahan data terkait analisis inferensia ini akan menggunakan *software Statistical Analysis System/Estimation Time Series (SAS/ETS)* versi 9.1.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai sumber pada periode 1987-2017. Sumber data adalah BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian ESDM dan beberapa sumber yang akuntabel

**Spesifikasi Model**

Spesifikasi model dimaksudkan untuk mengkaji mengenai hubungan diantara berbagai variabel endogen dan eksogen yang dituliskan dalam bentuk persamaan struktural dengan pendekatan ekonometrika. Model ekonometrika adalah suatu pola khusus dari model aljabar, yakni suatu unsur yang bersifat *stochastic* yang mencakup satu atau lebih peubah penggangguan. Koutsoyiannis (1977) mengatakan bahwa model digunakan dalam rangka untuk melakukan abstraksi dari fenomena dunia nyata.

Model yang digunakan dalam studi ini adalah model persamaan simultan (*Simultaneous Equation Model*). Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok dan terdiri dari 32 persamaan. Lima blok tersebut adalah Blok Fiskal Penerimaan Daerah, Blok Fiskal Pengeluaran Daerah, Blok PDRB, Blok Inflasi, dan Blok Indikator Sosial. Masing-masing blok terdiri dari persamaan struktural dan persamaan identitas. Formulasi model secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y^*_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 Z_{it} + \beta_4 Y_{it-j} + u_{it}$$

dimana,

- i = 1.....N dan t = 1.....T
- i = menunjukkan dimensi cross section
- t = menunjukkan dimensi time series
- Y<sub>it</sub> = Variabel endogen
- β<sub>i</sub> = Parameter
- X<sub>it</sub> = Variabel eksogen
- Y\*<sub>it</sub> = Variabel endogen penjelas
- Z<sub>it</sub> = Variabel instrumen
- Y<sub>it-j</sub> = Lag variabel endogen

u<sub>it</sub> = Error

Berkaitan dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Jakarta, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan ekonometrika. Persamaan ini merupakan salah satu persamaan dalam persamaan simultan. Secara rinci persamaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Jakarta adalah sebagai berikut.

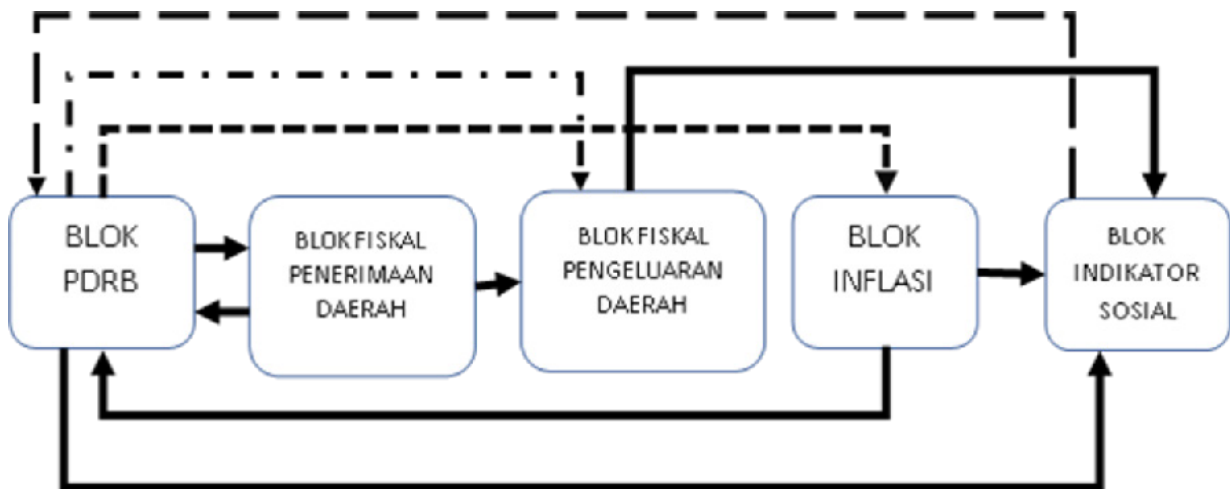
$$JUMIS_t = \beta_0 + \beta_1 GOV_t + \beta_2 IHK_t + \beta_3 UNEMP_t + \beta_4 D98 + u_t$$

dimana,

- t = 1..... T
- JUMIS<sub>t</sub> = Jumlah Penduduk Miskin tahun ke-t
- β<sub>i</sub> = Parameter
- GOV<sub>t</sub> = Pengeluaran Pemerintah tahun ke-t
- IHK<sub>t</sub> = Indek Harga Konsumen tahun ke-t
- UNEMP<sub>t</sub> = *Unemployment* (Pengangguran) tahun ke-t
- D98 = Variabel Dummy (1998=1, lainnya=0)
- u<sub>t</sub> = Error term

Persamaan yang disusun merupakan persamaan simultan yang terdiri dari lima blok. Adapun hubungan kelima blok dalam persamaan simultan tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1.

Blok Fiskal Penerimaan Daerah terdiri atas 13 persamaan dengan rincian 7 persamaan struktural dan 6 persamaan identitas. Blok Fiskal Pengeluaran Daerah terdiri dari 4 persamaan dengan 3 persamaan struktural



Gambar 1. Diagram Keterkaitan Antar Blok dalam Model Persamaan Simultan Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di DKI Jakarta.

dan 1 persamaan identitas. Blok PDRB mempunyai 7 persamaan, terdiri atas 5 persamaan struktural dan 2 persamaan identitas. Blok Inflasi terdiri atas 4 persamaan, 3 persamaan struktural dan 1 persamaan identitas. Sedangkan Blok Indikator Sosial terdiri dari 4 persamaan, yang semuanya persamaan struktural. Secara rinci blok dan persamaan dapat dilihat pada Lampiran 1.

### Identifikasi Model dan Metode Estimasi

Secara teori bahwa proses identifikasi terhadap suatu model dengan menggunakan model persamaan simultan merupakan langkah yang perlu untuk tujuan menentukan metode dalam mengestimasi parameter. Identifikasi model ditentukan atas dasar order condition sebagai syarat keharusan dan rank condition sebagai syarat kecukupan. Dalam hal ini bahwa menurut Koutsoyionis (1978), pendekatan ekonometrika dengan menggunakan sistem persamaan simultan mensyaratkan jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variable endogen.

Sementara menurut Gujarati (1995), syarat yang harus dipenuhi dalam proses identifikasi adalah order condition of identification yaitu bahwa jumlah variabel endogen dan eksogen yang tidak masuk dalam persamaan tetapi masuk dalam persamaan lain dalam sistem persamaan simultan tersebut harus sama dengan atau lebih besar dari jumlah variable endogen di dalam model dikurangi satu. Deskripsi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$(K - M) \geq (G - 1)$$

dimana,

- K = jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan *predetermined*)
- M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang teradapat dalam persamaan yang diidentifikasi,
- G = jumlah persamaan dalam model, yaitu sama dengan jumlah variable endogen dalam model

Berdasarkan order condition tersebut:

- i. Jika  $(K - M) > (G - M)$  maka persamaan disebut dikatakan persamaan teridentifikasi secara berlebih (*overidentified*).
  - ii. Jika  $(K - M) = (G - M)$  maka persamaan dikatakan teridentifikasi secara tepat (*just/exactly identified*).
  - iii. Jika  $(K - M) < (G - M)$  maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi (*unidentified*).
- Hanya persamaan yang *exactly* dan *overidentified*

saja yang parameternya dapat diestimasi berdasarkan kriteria order condition tersebut.

### Validasi Model

Sebelum melakukan peramalan maupun simulasi maka semua persamaan yang disusun harus divalidasi terlebih dahulu. Dalam Validasi model digunakan indikator statistik *Root Mean Square Percent Error* (RMSPE) untuk mengukur penyimpangan hasil prediksi dari nilai pengamatannya untuk setiap variabel endogen. Selain itu digunakan juga *Theil's Inequality Coefficient* (U-Theil). Semakin kecil nilai RMSPE dan U-Theil, maka model yang digunakan akan semakin baik (Koutsoyianis, 1977). Model dikatakan cukup valid dan bisa digunakan untuk simulasi kebijakan apabila memenuhi keseluruhan atau minimal salah satu kriteria nilai RMSPE di bawah 100 persen, U-Theil mendekati 0, atau koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mendekati 1 (Usman, 2006).

Formula statistik *Root Mean Squares Percentage Error* (RMSPE) dan *Theil's Inequality Coefficeint* (U-Theil) adalah sebagai berikut:

$$RMSPE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left( \frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a} \right)^2} \times 100$$

$$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\Delta Y_t^s - \Delta Y_t^a)^2}}{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\Delta Y_t^a)^2}}$$

dimana,

- T = Jumlah periode (tahun) pengamatan
- Y<sub>t-s</sub> = Nilai estimasi pengamatan pada period ke-t
- Y<sub>t</sub> = Nilai pengamatan aktual pada periode ke-t

### Peramalan

Karena data yang digunakan untuk estimasi parameter model adalah data tahun 1987-2017, maka ketika ingin melakukan peramalan atau prediksi data untuk tahun 2020-2022, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meramal terlebih dahulu variabel eksogennya. Estimasi dilakukan mulai tahun 2018-2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada Era Otonomi Daerah

Pada era otonomi daerah terjadi pergeseran dalam tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu perundangan yang mengatur Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan fundamental adalah UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada undang undang ini otonomi DKI Jakarta diletakan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta bukan pada Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Artinya bahwa kebijakan pemerintahan terletak pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dalam kontek kebijakan strategis termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan berada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ketatapemerintahan, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab gubernur sebagai kepala ibukota negara dilaksanakan oleh deputi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada era otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dibanding periode sebelumnya. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menentukan pembangunan daerahnya. Dengan tata kelola pemerintahan yang demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai keleluasaan dalam penyusunan kebijakan termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dibidang perekonomian. Dengan kebijakan yang telah diimplementasikan perekonomian DKI Jakarta tumbuh dengan baik dan stabil. Selama beberapa decade perekonomian DKI Jakarta menyumbang sekitar 16–17 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Jakarta harus mendapat perhatian khusus dalam konteks pembangunan perekonomian nasional. Uraian di atas menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat sentral dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang disusun dengan mendasarkan evidence akan memberikan hasil yang lebih baik dan tepat daripada kebijakan yang tanpa basis data dan infomasi yang kuat. Untuk itu kajian ini

sangat manfaat untuk dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

### Perekonomian dan Kemiskinan

Fenomena kemiskinan di daerah sangat berhubungan dekat dengan kinerja perekonomian suatu daerah. Semakin tumbuh dan berkembang suatu perekonomian daerah maka akan menurun jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Kondisi perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari kebijakan ekonomi pemerintah seperti kebijakan pengeluaran pemerintah, tingkat pengenaan pajak daerah, dan kebijakan teknis lainnya.

Kebijakan pengeluaran daerah untuk pembangunan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Dengan pengeluaran pemerintah yang tinggi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan membuka lapangan kerja yang berarti akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan tingkat pengangguran yang berkurang mengandung arti masyarakat akan mempunyai pendapatan yang cukup karena mereka memperoleh pekerjaan. Dengan kondisi ini berarti jumlah penduduk yang tergolong miskin akan berkurang. Jika indikator ini bergerak kearah yang membaik maka tingkat kemiskinan menurun. Dengan kata lain pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja perekonomian daerah menjadi relevan untuk diteliti dan dikaji guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mempunyai pengertian meningkatnya output barang dan jasa pada wilayah tertentu dan biasanya diukur dengan pertumbuhan nilai *Gross Domestic Product* (GDP). Dalam hal ini ada tiga faktor atau komponen utama yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah (Todaro & Smith, 2006). Pertama adalah berapa besar tingkat akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang dialokasikan dalam perekonomian. Kedua adalah berapa besar laju pertumbuhan penduduk yang akan menambah jumlah angkatan kerja dan yang ketiga adalah tingkat kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi secara langsung proses produksi dan akhirnya akan meningkatkan kuantitas produksi.

Hampir sama dengan Todaro & Smith (2006), teori pertumbuhan model *Solow* memfokuskan pada empat variabel, yaitu *output* (Y), *capital* (K), *labor* (L) dan *knowledge* atau *the effectiveness* tenaga kerja (A) (Romer, 2001). Formulasi model pertumbuhan Romer

adalah:

$Y_t = f(K_t, A_t, L_t)$  ..... t merupakan waktu

Berdasarkan persamaan di atas, faktor kapital, faktor tenaga kerja dan ilmu pengetahuan menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw (2003) modal manusia yang penting dalam perekonomian adalah modal pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam konteks ini, dari sisi permintaan agregat, maka peningkatan output domestik dapat diidentifikasi dengan empat komponen perekonomian, yaitu : (1) pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C), (2) pengeluaran investasi oleh dunia bisnis dan rumah tangga (I), (3) belanja pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan (4) *nett ekspor* (X-M) (Dornbusch, Fischer dan Startz, 2004).

Formula ini diadaptasikan oleh McCann (2006) untuk perekonomian daerah yang dikenal dengan permintaan agregate standar dari Keynesian untuk regional yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

$$Y_r = C_r + I_r + G_r + X_r - M_r$$

dimana,

- Y<sub>r</sub> : Pendapatan regional
- I<sub>r</sub> : Investasi regional
- C<sub>r</sub> : Konsumsi regional
- G<sub>r</sub> : Pengeluaran pemerintah daerah
- X<sub>r</sub> : Eskpor daerah
- M<sub>r</sub> : Impor daerah.

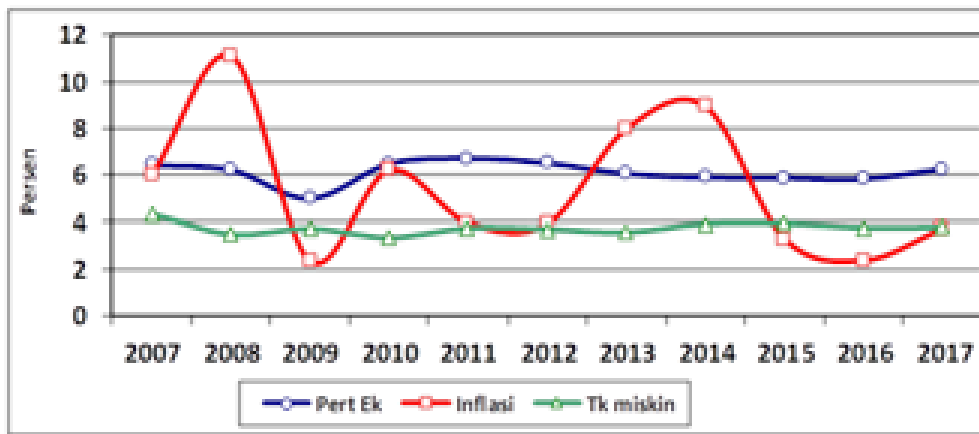
Formula di atas mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah sangat tergantung dari empat komponen di atas. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor juga meningkat atau nilai total dari keempat komponen bernilai positif.

Dari beberapa ukuran tersebut, indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kunci utama dalam

peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Argumennya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi. Jika hal ini terjadi berarti bisa membuka kesempatan kerja pada masyarakat. Selain itu dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka peluang bagi daerah untuk melakukan peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan akumulasi modal baik fisik maupun sumber daya manusia. Kondisi ini terjadi akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Selain itu, dengan terbukanya lapangan kerja memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Jadi secara teoritis bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didorong untuk mengurangi jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

### **Perkembangan Indikator Perekonomian DKI Jakarta**

Sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2001 telah terjadi perubahan tata kelola pemerintahan yang secara langsung juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada periode tahun 2007-2017 berkisar antara 4,6 persen sampai dengan 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ini tidak mengherankan karena DKI Jakarta merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. Namun demikian, tingkat inflasi di DKI Jakarta masih cukup tinggi dan rentan terhadap kebijakan pemerintah maupun guncangan dari luar. Ini dapat dilihat ketika krisis keuangan dunia tahun 2008 inflasi mencapai 11,11 persen. Hal ini terjadi karena barang-barang kebutuhan di DKI Jakarta sangat dipengaruhi pasokan dari luar baik dari provinsi lain maupun luar negeri. Selain itu, pada Gambar 2. juga dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di DKI Jakarta selama 2007 sampai dengan 2017 relatif stagnan meskipun ada kecenderungan menurun. Relatif tidak berubahnya jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum bisa dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (miskin). Perlu kebijakan dan upaya yang lebih komprehensif agar pertumbuhan yang tinggi dapat menyentuh masyarakat yang paling bawah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Zuhdiyaty dan David (2017) terhadap 33 provinsi di Indonesia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak



Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta, 2007-2017  
 Sumber: BPS (beberapa tahun)

berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. wilayah tertentu dan tumbuh dengan intensitas yang bervariasi.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan perekonomian DKI Jakarta adalah penentuan titik tumbuh perekonomian atau yang disebut dengan kutub tumbuh perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Perroux (2007) dalam Adisasmita (2008), berpendapat bahwa suatu tempat dikatakan sebagai kutub pertumbuhan apabila di tempat tersebut terdapat industri kunci (key industry). Industri kunci ini memainkan peranan sebagai pendorong yang dinamik, karena industri tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan inovasi. Wilayah yang mempunyai industri kunci yang tumbuh dengan baik, maka industri tersebut merupakan kutub pertumbuhan. Selanjutnya kutub pertumbuhan tersebut jika berkumpul, maka akan dapat merupakan suatu kompleks industri, yang berkelompok di sekitar industri kunci. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa industri kunci dalam suatu wilayah, juga sangat menentukan aktivitas perekonomian.

Dengan dasar tersebut, Perroux (2007) dalam Adisasmita (2008) menyebutkan ada tiga ciri penting dalam konsep titik pertumbuhan, yaitu: (1) terdapat keterkaitan internal antara berbagai industri secara teknik dan ekonomi, (2) terdapat pengaruh multiplier, dan (3) terdapat konsentrasi geografis.

Sedangkan dalam Capello (2007) Perroux mengatakan bahwa teori kutub pertumbuhan merupakan teori yang membahas secara detail tentang pertumbuhan suatu wilayah. Basis dari teori ini menyatakan bahwa pembangunan tidak tumbuh di setiap tempat pada waktu yang sama. Pertumbuhan terkonsentrasi pada

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Hasil estimasi dari model yang telah disusun selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika. Berdasarkan kriteria ekonomi, hasil estimasi parameter setiap persamaan struktural dalam model yang disusun adalah sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda dan besaran nilai estimasi parameter untuk menggambarkan hubungan antara variabel endogen dengan variabel-variabel penjelasnya.

Selanjutnya dilakukan uji menurut kriteria statistik terhadap persamaan yang telah disusun. Hasil estimasi model juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) setiap persamaan struktural yang sedang yaitu berkisar antara 0,62 sampai dengan 0,99, kecuali untuk persamaan jumlah penduduk miskin (JUMIS) dan penerimaan retribusi (RET) yang bernilai masing-masing 0,32 dan 0,39. Ini menunjukkan bahwa secara umum variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan antara 62 persen sampai dengan 99 persen keragaman variabel-variabel endogennya.

Secara konsep, nilai statistik uji-F yang dihasilkan untuk menguji apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya semuanya bernilai kurang dari 0,01. Ini berarti variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya.

Berdasarkan hasil pengujian estimasi parameter tersebut. maka model yang digunakan dalam penelitian

ini cukup baik dalam menjelaskan perilaku variable-variabel ekonomi terhadap keuangan dan perekonomian DKI Jakarta

Berkaitan dengan salah satu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DKI Jakarta, maka dilakukan analisis terhadap persamaan kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan didekati dengan menggunakan indikator jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Hasil estimasi parameter persamaan jumlah penduduk miskin dalam persamaan simultan yang disusun dapat dilihat dalam Tabel 1

Dalam Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dipengaruhi jumlah pengangguran, sementara variabel pengeluaran pemerintah dan IHK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Krisis ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.

Parameter dugaan jumlah pengangguran (UNEMP) sebesar 0,104685 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti meningkatnya jumlah pengangguran akan memicu kenaikan jumlah penduduk miskin. Peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 1000 orang akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 105 orang. Hasil ini menunjukkan hubungan yang kuat antara pengangguran dan kemiskinan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rusdarti & Lesta (2013) yang menyatakan kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengangguran. Hal ini juga memperkuat pendapat Kelso (1994) yang menyatakan tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian terkait kemiskinan.

Krisis ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan pada saat krisis terjadi

banyak pemutusan hubungan kerja, banyak usaha bangkrut, dan harga-harga naik, sementara pemasukan berkurang. Banyaknya usaha tutup menyebabkan tidak berimbangnya antara supply dan demand tenaga kerja dalam perekonomian. Perekonomian yang mengalami kontraksi cukup dalam karena krisis menyebabkan lapangan kerja tidak bertambah bahkan berkurang. Sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran yang berdampak banyak masyarakat di DKI Jakarta yang jatuh miskin. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Rusdarti dan Lesta (2013) dimana belanja pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah pengertian kemiskinan itu sendiri. Hal ini penting karena pengertian ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Menurut Sen (1982) menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan sosial dan ekonomi yang tidak mampu memenuhi yang ada dalam lingkungan sosialnya. Berbeda dengan Sen, menurut Kelso (1994) kemiskinan disebabkan oleh tidak berimbangnya antara *supply* dan demand tenaga kerja dalam perekonomian. *Supply* tenaga kerja disebabkan oleh ketidakcukupan pendidikan yang dimiliki oleh orang miskin sedangkan dari sisi permintaan akan tenaga kerja disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak berubah. Perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang memadai sehingga lapangan kerja tidak bertambah. Jadi aspek tenaga kerja menjadi penting juga dalam konteks kemiskinan.

Berbagai penelitian menemukan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat variatif. Menurut Rusdarti & Lesta (2013), jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh nilai PDRB, tingkat pengangguran, besarnya realisasi belanja APBD yang dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya menurut Zuhdiyaty

Tabel 1. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Penduduk Miskin (JUMIS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2017

Variabel	Estimasi Parameter	Prob >  t	Keterangan
Intercept	319,9391	<.0001	
GOV	-0,00029	0,6463	Peng pemerintah (Juta Rp)
IHK	0,407912	0,5524	Indeks harga konsumen
UNEMP	0,104685	0,0241	Jumlah pengangguran (Ribu org)
D98	167,0304	0,0233	1998=1, lainnya 0

Adj-R2 = 0,32186; F-Stat = 4,44; Pr > F = 0,0075; DW = 1.528797



& David (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia didekati dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Hasilnya menunjukkan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Mengingat pendapatan merupakan salah satu isu sentral dalam membahas kemiskinan, maka penelitian Nalle, Frederic & Emilia (2018) fokus pada pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Nalle, Frederic dan Emilia, (2018), secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara variabel curahan jam kerja, pendidikan, usia, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa dari perspektif ekonomi masing-masing daerah mempunyai keunikan dalam konteks penyebab kemiskinan. Namun, secara umum bahwa penyebab kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan dan sasaran yang tepat.

### Proyeksi Kemiskinan di DKI Jakarta

Dengan model yang telah disusun, dapat dilakukan proyeksi kemiskinan di DKI Jakarta. Sebelum melakukan proyeksi maka perlu dilakukan validasi model. Tujuan dari validasi adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan nilai estimasi dari model yang disusun dengan nilai pengamatan dari masing-masing peubah endogen.

Hasil validasi menggunakan indikator RMSPE dan nilai U-Theil menunjukkan dari 32 persamaan yang disusun, 22 persamaan (68,75 persen) mempunyai RMSPE lebih kecil dari 100 persen dan 28 persamaan (87,5 persen) mempunyai nilai statistik U-Theil lebih kecil dari 0,20. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik model yang disusun memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat analisis. Dengan

kata lain maka persamaan tersebut cukup valid digunakan untuk melakukan peramalan dan simulasi kebijakan.

Berikut adalah perkiraan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2020, 2021, dan 2022 (Tabel 2). Perkiraan tersebut dihitung dengan asumsi kondisi normal dan tidak ada perubahan yang signifikan, baik dari sisi perekonomian maupun kebijakan pemerintah seperti alokasi anggaran.

Tabel 2 di atas memberikan informasi kuantitatif yang menarik untuk dianalisis. Apabila Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kebijakan yang drastis atau bekerja sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta cenderung menurun pada tahun 2020-2022. Namun, meskipun menurun tetapi tingkat penurunannya relatif kecil. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 357,3 ribu orang. Pada tahun berikutnya turun menjadi 353,6 ribu orang, atau mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibanding tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 347,3 ribu orang atau turun sebesar 1,78 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2020-2022 juga diperkirakan cenderung menurun. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 3,35 persen terhadap total penduduk. Pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan turun menjadi 3,28 persen dan 3,19 persen dari total penduduk.

Hasil ini menunjukkan meskipun pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata sekitar 5 persen per tahun, namun pengaruhnya relatif kecil terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Ini perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Perlu alokasi dan strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta. Sebagaimana penelitian Hasanah & Hermanto (2014) yang menemukan bahwa anggaran yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan adalah belanja daerah yang

Tabel 2. Perkiraan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Variabel (1)	Keterangan (2)	Satuan (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)
JUMIS	Jumlah penduduk miskin	Ribu org	357,3	353,6	347,3
TKMIS	Tingkat kemiskinan	Persen	3,35	3,28	3,19

ditujukan untuk urusan ketahanan pangan. Program pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta tentunya harus mempunyai strategi tersendiri mengingat fungsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, pusat perekonomian dan keuangan. Dibutuhkan perencanaan yang matang terkait sasaran utama dari pengeluaran publik agar dampak pengeluaran publik terhadap pengurangan kemiskinan lebih nyata dan signifikan. World Bank (2004) dalam Helena & Hermanto (2014) menemukan bahwa pengeluaran publik di bidang kesehatan dan investasi infrastruktur lebih banyak memberikan manfaat untuk rumah tangga yang lebih mapan jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Oleh karena itu hal ini perlu menjadi perhatian untuk masukan dalam penyusunan kebijakan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa terdapat fenomena hubungan yang kuat antara pengangguran dan kemiskinan. Dengan dasar ini, maka kebijakan pemerintah perlu seleksi dengan baik. Sektor atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja perlu mendapat perhatian khusus atau insentif, karena selain dapat mengurangi pengangguran juga sekaligus mengurangi kemiskinan. Untuk itu program yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan umum perlu disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan kondisi social ekonomi masyarakat.

Perekonomian Jakarta Perkiraan perekonomian DKI Jakarta ke depan yang diperkirakan masih cukup bagus, namun tetap harus waspada dari berbagai gejala ekonomi baik internal maupun eksternal. Sehingga dampak kejadian seperti krisis ekonomi tahun 1998 dapat diantisipasi lebih dini.

Selain itu, perlu mendapat perhatian juga bahwa perekonomian Jakarta berbeda dengan perekonomian daerah lain. Variable perekonomian DKI Jakarta lebih kompleks dari daerah lain. Alasannya adalah bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang mempunyai multi fungsi. Fungsi Jakarta antara lain adalah sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pusat perekonomian nasional, kota budaya, dan pusat aktivitas keuangan nasional. Dengan demikian maka variabel indikator perekonomian lebih variatif dan lebih kompleks. Untuk itu, diperlukan usaha lebih serius, terencana dengan baik dan sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel untuk menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan akan menjadi lebih baik dan tepat sasaran jika didukung dengan data yang akuntabel dan tepat.

## KESIMPULAN

- Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta adalah jumlah pengangguran. Variabel pengeluaran pemerintah dan IHK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Selain itu, kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 juga mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.
- Dengan menggunakan persamaan simultan diperkirakan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada periode 2020-2022 terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2020 diperkirakan sebanyak 357,3 ribu orang, pada tahun 2021 sebanyak 363,6 ribu orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 347,3 ribu orang.
- Sejalan dengan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2020-2022 juga cenderung menurun. Tingkat kemiskinan di Jakarta tahun 2020 sebesar 3,35 persen, tahun 2021 sebesar 3,28 persen, dan tahun 2022 sebesar 3,19 persen.
- Fenomena perekonomian Jakarta sangat unik. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada periode tahun 2007-2017 berkisar antara 4,6 persen sampai dengan 6,2 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tingkat inflasi di DKI Jakarta masih cukup tinggi dan rentan terhadap kebijakan pemerintah maupun guncangan dari luar.
- Fenomena kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, yang meliputi dimensi ekonomi, edukasi, sosial budaya dan theologis. Oleh karena itu dalam penyusunan kebijakan harus menggunakan pendekatan yang multidimensi tidak hanya pendekatan ekonomi saja. Hal ini terbukti bahwa yang mempengaruhi secara statistik signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jakarta hanya jumlah pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Zuhdiyaty, N. & David, K. (2017). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia selama Lima Tahun terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jurnal JIBEKA*,11(2): 27-31.
- Nalle, Frederic, W., & Emilia, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi, JDEP*, 1(30): 35-45.

- Hasanah, H., & Hermanto, S. (2014). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan rakyat terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika Panel Data Tingkat Provinsi. *Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVII.*: 255-264.
- Rusdarti & Lesta (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9(1):
- Martinez-Vazquez., J., & McNab, M.R. (2001). Decentralization Fiscal and Economic Growth. International Studies Working paper Series No. 97-7 Andrew Young Schools of Policies Studies. July.
- Dornbusch, R., S. Fischer & R. Startz. (2004). *Macroeconomics*. Ninth Edition. The McGraw-Hill Company, New York.
- Gujarati, D.N. (1995). *Basic Econometric*. Mc.Graw Hill. New York.
- Koutsoyiannis, A. (1977). *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometrics Methods*. Second Edition. Harper and Row Publisher, London.
- Mankiw, N.G. (2003). *Macroeconomics*. Fifth Edition. Worth Publisher, New York.
- McCann, P. (2006). *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press, New York.
- Kelso, A.W. (1994). *Poverty and the Underclass: Changing Perceptions of The Poor in America*. New York University Press, New York.
- Mangkoesebroto., G. (1998). *Ekonomi Publik* Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Romer, D. 2001. *Advanced Macroeconomics*. Second Edition, McGraw-Hill, International Addition, New York
- Sen, A. 1982. *Choice Welfare and Measurement*. MIT Press, Cambridge.
- Todaro, M. dan Smith, S.C. 2006. *Economic Development*, Ninth Edition. Addison Wesley Harlow, Boston
- Usman, 2006. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan*. Tesis Magister Sains. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Undang Undang No: 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lampiran 1. Model Perekonomian DKI Jakarta

I. Blok Fiskal Penerimaan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

1.  $PJK\_KD_t = a_0 + a_1JMKEND_t + a_2D98 + u_{1t}$
2.  $JMKEND_t = b_0 + b_1PDRB_t + b_2HECBBM_t + b_3D98 + u_{2t}$
3.  $PJK\_HR_t = c_0 + c_1GOV_t + c_2HOTEL_t + c_3D98 + u_{3t}$
4.  $BPHTB_t = d_0 + d_1INV_t + d_2POP_t + d_3D98 + u_{4t}$
5.  $RET_t = e_0 + e_1JMKEND_t + e_2WISNUSt + e_3D98 + u_{5t}$
6.  $PAD_t = PJK\_KD_t + PJK\_HR_t + BPHTB_t + PBB_t + PJK\_LN_t + RET_t + HSLKAYA_t + LPAD_t$

Tabel. 1. Tanda dan Besaran yang Diharapkan pada Subblok Pendapatan Asli Daerah

Pers	Uraian	>0	<0	0 < X < 1
1	Pajak Kendaraan (PJK_KD)	$a_1$	$a_2$	
2	Jam Kendaraan (JMKEND)	$b_1, b_2$	$b_3$	
3	Pajak Hotel dan Restoran (PJK_HR)	$c_1, c_2$	$c_3$	
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	$d_1, d_2$	$d_3$	
5	Retribusi (RET)	$e_1, e_2$	$e_3$	

B. Dana Perimbangan

7.  $BHP_t = f_0 + f_1PDRB_t + f_2PBB_t + f_3D98 + u_{6t}$
8.  $BHBP_t = g_0 + g_1PDRB_t + g_2D98 + u_{7t}$
9.  $DBH_t = BHP_t + BHBP_t$
10.  $DANPER_t = DAU_t + DAK_t + DBH_t$
11.  $CAPFIS_t = PAD_t + DBH_t$
12.  $TOTREV_t = PAD_t + DANPER_t + LPEND_t$

Tabel. 2. Tanda dan Besaran yang Diharapkan pada Subblok Dana Perimbangan

Pers	Uraian	>0	<0	0 < X < 1
7	Bagi Hasil Pajak (BHP)	$f_1, f_2$	$f_3$	
8	Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP)	$g_1$	$g_2$	

C. Celah Fiskal

13.  $GAPFIS_t = TOTPENGT_t - CAPFIS_t$

II. Blok Fiskal Pengeluaran Daerah

14.  $BLJPEG_t = h_0 + h_1TOTREV_t + h_2JMPEG_t + h_3D98 + u_{8t}$
15.  $BLJBRG_t = i_0 + i_1TOTREV_t + i_2BLJPEG_t + i_3D98 + u_{9t}$
16.  $BLJMDL_t = j_0 + j_1TOTREV_t + j_2BLJPEG_t + j_3BLJBRG_t + j_4D98 + u_{10t}$
17.  $TOTPENGT_t = BLJPEG_t + BLJBRG_t + BLJMDL_t + BLJLAIN_t$

Tabel. 3. Tanda dan Besaran yang Diharapkan pada Blok Fiskal Pengeluaran Daerah

Pers	Uraian	>0	<0	0 < X < 1
14	Belanja Pegawai (BLJPEG)	$h_1, h_2$	$h_3$	
15	Belanja Barang (BLJBRG)	$i_1, i_2$	$i_3$	
16	Belanja Barang (BLJMDL)	$j_1, j_2, j_3$	$j_4$	

III. Blok PDRB

18.  $CON_t = k_0 + k_1(PDRB_t - PJK_t) + k_2MYS_{98} + k_3D98 + u_{11t}$   
 19.  $INV_t = l_0 + l_1PDRB_t + l_2TABMASt + l_3D98 + u_{12t}$   
 20.  $GOV_t = m_0 + m_1TOTREV_t + m_2D98 + u_{13t}$   
 21.  $EKSPOR_t = n_0 + n_1PDRB_t + n_2KURSt + n_3D98 + u_{14t}$   
 22.  $IMPOR_t = o_0 + o_1PDRB_t + o_2KURSt + o_3D98 + u_{15t}$   
 23.  $PDRB_t = CON_t + INV_t + GOV_t + EKSPOR_t - IMPOR_t$   
 24.  $PDRBCAP_t = PDRB_t / POP_t$

Tabel. 4. Tanda dan Besaran yang Diharapkan pada Blok PDRB

Pers	Uraian	>0	<0	0 < X < 1
18	Konsumsi (CON)	$k_1, k_2$	$k_3$	
19	Investasi (INV)	$l_1, l_2$	$l_3$	
20	Pengeluaran Pemerintah (GOV)	$m_1$	$m_2$	
21	Ekspor (EKSPOR)	$n_1, n_2$	$n_3$	
22	Impor (IMPOR)	$o_1$	$o_2$	

IV. Blok Inflasi

25.  $IHK_t = p_0 + p_1UANGBR_t + p_2KURSt + p_3HECBBM_t + p_4TDL_t + p_4D98 + u_{16t}$   
 26.  $INFLASIt = (IHK_t - IHK_{t-1}) / IHK_{t-1} * 100$   
 27.  $KURSt = q_0 + q_1IHK_t + q_2CADEV_t + q_3D98 + u_{17t}$   
 28.  $UANGBR_t = r_0 + r_1INV_t + r_2SBI_t + r_3D98 + u_{18t}$

Tabel. 5. Tanda dan Besaran yang Diharapkan pada Blok Inflasi

Pers	Uraian	> 0	< 0	0 < X < 1
25	Indek Harga Konsumen (IHK)	$p_1, p_2, p_3, p_4$		
27	Nilai Tukar Rupiah terhadap US \$ (KURS)	$q_1$	$q_2$	
28	Uang Beredar (UANGBR)	$r_1$	$r_2$	

V. Blok Indikator Sosial

29.  $IPM_t = s_0 + s_1PDRBCAP_t + s_2MYS_t + s_3BLJLAIN_t + u_{19t}$   
 30.  $JUMIS_t = t_0 + t_1GOV_t + t_2IHK_t + t_3UNEMP_t + t_4D98 + u_{20t}$   
 31.  $MYS_t = u_0 + u_1(PDRB_t - PJK_t) + u_2RUEMP_t + u_3D98 + u_{21t}$   
 32.  $TK_t = v_0 + v_1PDRB_t + v_2AK_t + v_3D98 + u_{22t}$

Tabel. 6. Tanda dan Besaran yang Diharapkan pada Blok Indikator Sosial

Pers	Uraian	> 0	< 0	0 < X < 1
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	$s_1, s_2, s_3$		
2	Jumlah Penduduk Miskin (JUMIS)	$t_2, t_3, t_4$	$t_1$	
3	Mean Years Schooling (MYS)	$u_1$	$u_2, u_3$	
4	Jumlah Tenaga Kerja (TK)	$v_1, v_2$	$v_3$	

